



WANUA TO MACCA

Jurnal Studi Pendidikan

E-ISSN : 3063-0851, P-ISSN : 3062-9357

Vol. 1, Nomor 2, 2024

Peran Anggota DPRD Dalam Membangun Kota Palopo

¹Megawati Megawati, ²Busra Bumbungan, ³Rizal A.M. Sjachrun

¹Universitas Cokroaminoto Palopo, Indonesia

²Universitas Cokroaminoto Palopo, Indonesia

³Universitas Cokroaminoto Palopo, Indonesia

WANUA TO MACCA
Jurnal Studi Pendidikan
Vol. 1, Nomor 2, 2024

Megawati
megawati@uncp.ac.id

Diterbitkan oleh:

Lingkar Publikasi Indonesia

Hak Cipta © 2024

Penulis

Artikel ini dilisensikan di
bawah Lisensi CC BY-NC-SA
4.0



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran anggota DPRD dalam pembangunan daerah di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga peneliti sendiri ke lokasi penelitian untuk mencari informasi sekaitan topik penelitian melalui teknik pengambilan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data penelitian dianalisis melalui tahapan kondesasi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai peran anggota DPRD Kota Palopo, yakni (1) berperan sebagai lembaga untuk menampung dan melakukan tindak lanjut atas aspirasi dari masyarakat, (2) berperan sebagai perancang, penganggaran dan pengawasan kebijakan dan undang-undang sekaitan pengembangan daerah.

Kata Kunci: *Peran Anggota DPRD, Pembangunan Daerah*

Peran Anggota DPRD Dalam Membangun Kota Palopo

Pendahuluan

Era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini telah berjalan di Negara kita ini (Legowo, T.A. 2005), diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat diberbagai sektor kehidupan. Dengan adanya ekonomi dan desentralisasi (Marijan, K., 2010), maka diberikan kewenangan daerah untuk mengatur serta menata sistem pemerintahan di daerah tertentu (Adianto & As' ari, H., 2016). Selain itu, peran masyarakat sangat diharapkan agar berperan secara aktif dalam mewujudkan rancangan daerah yang disusun oleh pemerintah (Sudarmansyah, A., dkk. 2013); (Romli, L., 2007).

Kuatnya peran anggoa DPRD untuk saat ini yang dikuatkan dengan kebijakan otonomi daerah (Ardipandanto, A., dkk., 2020), sehingga keberadaan peran anggota DPRD menjadi posisi sentral. Terwujudnya sistem pemerintah yang baik, maka tidak bisa terlepas dari pantauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat (Indartini, M. dkk., 2019). Seperti yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Namun, Situasi dan kondisi saat ini, peran DPRD telah mengalami pergeseran makna (Mas'oed, M., 2003); (Suharto, E., 2006).

Tujuan anggota DPRD yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan pemangku pemerintahan di kota Palopo mampu memberikan terwujudnya iklim dan harmonisasi dalam membangun kota Palopo. Untuk itu, anggota dewan dalam saat melakukan reses agar menjalin komunikasi positif dengan masyarakat, sedapat mungkin menjadi sebagai seorang broker komunikasi, yakni sebagai media perantara antara pemerintah dan konstituennya. Anggota dewan menganalisis masalah, mempetakkan ide dan gagasan sesuai dengan yang disampaikan oleh masyakat. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat dalam menjalankan perannya ternyata belum maksimal sehigga tujuan keberadaan angota DPRD sebagai wakil ranyat yang akan memperjuangkan hak-hak masyarakat belum dapat diwujudkan sesuai harapan masyarakat.

Metode

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan studi deskriptif kualitatif sehingga sifat penelitian merupakan rangkaian narasi dan bukan untuk menguji sebuah hipotesis. Narasai

yang terbangun mengenai peran anggota DPRD dalam membangun Kota Palopo demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo. Penelitian dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Palopo.

Sifat penelitian kualitatif mengharuskan peneliti yang ke langsung lokasi penelitian untuk mencari informasi secara mendalam mengenai topik peran anggota DPRD di Kota Palopo. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah anggota DPRD dan masyarakat Kota Palopo, kemudian informasi dari anggota DPRD Kota Palopo diperoleh menggunakan beberapa cara seperti teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi (Moloeng, 2010); (Bungin, 2003). selanjutnya informasi yang ditemukan akan diolah melalui teknik tahapan kondensasi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana (2014)).

Hasil

Peran anggota DPRD dalam pengembangan daerah menjadi unsur pelaksanaan asas desentralisasi (Legowo, T.A., 2005); (Marijan, K., 2010). Dalam paradigma sistem politik, kebijakan sekaitan administrasi pemerintah merupakan langkah strategis dalam membenahi suatu daerah tertentu. Peran anggota DPRD salah satunya adalah penyusunan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah (Saputra, W.A dan Yuwanto. 2019). Penganggaran tersebut sekaitan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD. Penganggaran yang dirancang dalam organisasi DPRD perlu memperhatikan semua aspek dan mengarah kepada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kota.

Konteks politik lokal (tokoh politik yang memerintah di tingkat daerah) menjadi integral yang tidak terpisah dengan tujuan pembagunan daerah. Peran anggota DPRD seperti kemampuan komunikasi secara horizontal dan vertikal dalam memperjuangkan tujuan masyarakat (Rauf, 2000). Keberadaa anggota DPRD di kota palopo sesungguhnya mediator antara DPRD di tingkat pusat dengan masyarakat di daerah. Peran angota DPRD sebagai birokrat dan sebagai pemimpin. Sebagai birokrat berarti anggota DPRD adalah bagian yang tidak dipisahkan dengan elit politik pada tataran pusat dan sebagai pemimpin yakni perwakilan rakyat yang memahami dan mementingkan kepentingan masyarakat (Rauf, 2000). Peran anggota DPRD saat menjadi elit lokal harus mampu menjadi figure yang tampil sebagai pemimpin untuk tujuan masyarakat, maka anggota DPRD sekaligus masyarakat harus harus mampu berjuang.

Hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran partai politik dalam pembangunan daerah di Kota Palopo. Masih tergolong mengambang karena tidak adanya transparansi antara masyarakat dan anggota DPRD mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Sehingga dampak yang ditimbulkan akibat tidak adanya transparansi tersebut melahirkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD khususnya dalam hal pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Palopo.

Selanjutnya warga kota palopo mengatkan bahwa pembangunan daerah di Kota Palopo tergolong lebih maju di banding dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi selatan, peningkatan pembangunan daerah dapat di lihat dari data jawaban responden yang menyatakan “baik” terhadap pembangunan daerah di Kota Palopo saat ini.

Selanjutnya anggota dewan menyatakan bahwa pemerataan pembangunan daerah di Kota Palopo sudah memasuki masa peningkatan pembangunan, baik di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil yang susah dijangkau oleh masyarakat luas. Adapun contoh pemerataan pembangunan ialah, tersedianya perhubungan jalan dan transportasi, pembangunan pusat niaga untuk menunjang pendapatan masyarakat, sekolah, rumah-rumah ibadah, puseksmas dan sarana prasarana lain-lain sebagainya.

Berbeda lagi dengan anggota dewan di komisi....mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai retribusi jasa umum, Perda Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, dan Perda Pengolahan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Selanjutnya masyarakat mengatakan bahwa langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan pembangunaan daerah di Kota Palopo. Dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Palopo.

Sejauh tidak ada dampak negatif terhadap langkah-langkah pemerintah dalam pembangunan daerah di Kota Palopo. Hanya ada dampak positif terhadap langkah-langkah pemerintah daerah dalam pembangunan daerah sebagai berikut ialah, membantu masyarakat dalam hal finansial berupa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana Kota Palopo, seperti pembangunan pusat niaga, untuk memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dan pelaku ekonomi untuk berinvestasi.

Selanjutnya anggota komisi mengatakan bahwa peran partai politik sangat berpengaruh pada pembangunan daerah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi atau peran

partai politik sebagai penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah pusat. Demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Palopo.

Pembahasan

Peran anggota DPRD Kota Palopo sangat penting dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kota Palopo, ditandai dengan pembangunan sarana prasarana yang memadai menjadi satu contoh bukti nyata peran partai politik dalam pembangunan daerah saat ini (Mas'oed, M., 2003). Seperti tersedianya sarana dan prasarana perhubungan atau transportasi, listrik, air bersih, telpon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan sarana kesehatan. merupakan salah satu bentuk inisiatif anggota DPRD sebagai penampung aspirasi rakyat (Ardipandanto, A., dkk., 2020); (Indartini, M. dkk., 2019). Untuk memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat maupun pelaku ekonomi (Suharto, E., 2006). Kemudian jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Palopo termasuk salah satu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Sedangkan respon masyarakat tentang peran partai politik sangat berbanding terbalik dengan respon anggota DPRD dalam kaitannya dengan pembangunan daerah di Kota Palopo.

Masyarakat sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan Kota Palopo. Masyarakat sebagai pengamat dan evaluator bagi anggota DPRD Kota Palopo saat menjalankan amanah yang telah diamanahkan saat pelantikan. Masyarakat menyadari bahwa anggota DPRD Kota Palopo cukup baik dalam memberikan sumbangsih untuk memenuhi kepentingan masyarakat apa lagi dalam hal pembangunan daerah di Kota Palopo, dimana seiring dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan rakyat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Legowo, T.A., 2005); (Romli, L., 2007). Maka dari itu peran aktif anggota DPRD sebagai penampung aspirasi rakyat, sangat diperlukan masyarakat Kota Palopo agar ke depannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat memihak terhadap kepentingan rakyat (Agustino, L., 2009); (Gaffar, A., 2005). Sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai penampung aspirasi masyarakat khususnya di Kota Palopo.

Simpulan

Hasil penelitian tentang peran anggota DPRD di Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Kota Palopo pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik dalam

menjalankan tugas secara formal dan non formal. Peran anggota DPRD Kota Palopo sebagai lembaga untuk menampung dan melakukan tindak lanjut atas aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut dijadikan sebagai bentuk opini publik dalam menyusun ide pengembangan kota Palopo. Selain itu anggota DPRD juga berperan sebagai perancang, penganggaran dan pengawasan kebijakan dan undang-undang sekaitan pengembangan daerah. Partisipasi masyarakat memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kota Palopo. Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam memberikan aspirasi perlu ditingkat secara komprehensif sebagai modal yang kuat untuk mewujudkan program dan kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan masyarakat di Kota Palopo.

Referensi

- Adianto & As' ari, H. 2016. Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti. PUBLIKA, Vol 2, No 1. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/download/1937/1172/4343>.
- Agustino, L. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Penerbit PT. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ardipandanto, A., dkk. 2020. *Peranan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah*. Pustaka Obor Indonesisa, Jakarta
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Rajawali
- Gaffar, A.2005. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Penerbit PT. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Indartini, M. dkk. 2019. *Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Penerbit Taujik. Madiun
- Legowo, T.A. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah*. AIPI, Jakarta.
- Mas'oed, M. 2003. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Miles, BM guba. Huberman, AM. Saldana, J. Qualitative. 2014. *Data Analysis A Methids Sourcebook*, Edisi 3. SAGE Publications.
- Moloeng, lexy.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 2000. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta
- Saputra, W.A dan Yuwanto. 2019. Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol IV, No. 2.
- Sudarmansyah, A., Suni, B., Asmadi., 2013. Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen

Di Kabupaten Kubu Raya. <https://media.neliti.com/media/publications/9523-ID-peran-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dari-fraksi-pdi-perjuangan-dal.pdf>

Suharto, E. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.

Romli, L. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Undang Undang Otonomi Daerah, No. 12 Tahun 2008, Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang PEMDA, Permata Pers, 2009. Jakarta